



TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES

TAHUN

2015

HALAMAN

3b

Ada Masalah, Harus Terbuka ke BPK

MALINAU - Pada pelaporan keuangan tahun anggaran 2014, Kabupaten Malinau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pencapaian ini diharapkan BPK RI dapat menjadi motivasi bagi seluruh pejabat dan staf untuk lebih baik dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan bertanggungjawab terhadap keuangan di Malinau.

Saat berkunjung ke Malinau beberapa waktu lalu, Ketua BPK-RI perwakilan Kalimantan Iwan Ade Rusmana menceritakan proses panjang yang akhirnya bisa dicapai Kabupaten Malinau.

Dituturkan Ade, ada catatan penting yang harus diperhatikan atas diperolehnya WTP dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2014. Saat proses pemeriksaan oleh BPK, dirinya bersama tim pemeriksa melakukan diskusi secara intens tentang pengelolaan aset di Kabupaten Malinau.

Di sela-sela diskusi tersebut, dia menilai ada momen sangat bagus di Malinau. Intinya, lanjutnya memang harus ada keberanian dalam mengambil kebijakan untuk membersihkan aset-aset daerah.

Tidak lama setelah diskusi bersama tim BPK dilakukan, saat itu bupati langsung menerbitkan kebijakan soal pengelolaan aset. Atas langkah tersebut, BPK RI mengapresiasi langkah yang diambil pemkab Malinau. Hal inilah yang akhirnya menjadi dasar bagi BPK



AGUSSALAM SANIP/RADAR TARAKAN

RI untuk memberi opini WTP-Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

Embel-embel dengan paragraf penjelasan (DPP) ini sebutnya, karena ada momen penting dalam pemberian opini. Namun dia mengungkapkan hal itu tidak diungkapkan lagi pada tahun depan.

Selain memaparkan peraihan WTP-DPP, Iwan Ade juga memaparkan satu hal terkait pelaporan keuangan. Meski tidak signifikan, sebut dia, tetapi hal ini penting untuk menjadi pembelajaran. Dijelaskannya, saat pemeriksaan laporan keuangan me-

mang sempat terjadi kejanggalan. Namun setelah ditelusuri, akhirnya permasalahan tersebut bisa ditemukan. Diusut-usut, ternyata telah terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan saat itu, yakni *double counting* (pencatatan dua kali).

Ditambahkan dia, proses pemberian opini WTP ini bukanlah soal gampang. Untuk itu, BPK mengharapkan, meski hanya selisih angka sedikit, tapi perlu benar-benar diperhatikan oleh pengelola keuangan.

"Tidak mungkin BPK bisa memberi

BERI SARAN:
Ketua BPK RI
Perwakilan Kaltara
Iwan Ade Rusmana
(depan paling kiri)
berfoto bersama
kepala SKPD
di lingkungan
pemkab Malinau
usai menyerahkan
piagam penghargaan
opini WTP
belum lama ini.

opini WTP kalau laporan keuangan tidak *balance* (seimbang). Itu perlu menjadi pembelajaran bersama. Apapun permasalahan yang dihadapi sejak awal, wajib berterus-terang kepada kami. *Gak* usah takut, karena kehadiran kami memberikan koreksi jika ada kesalahan. Kalau informasi tidak sampai ke BPK, kami juga akan susah melakukan pemeriksaan," tuturnya. Ditegaskan, karena keterbatasan informasi yang diperoleh BPK, bisa membuat daerah mendapat opini *disclaimer*. (*/umy)